

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKIRPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Tipe Penelitian	13
1.5.2. Pendekatan Masalah	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	17

BAB II DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN TERTUTUP (<i>TYING AGREEMENT</i>) UNTUK LAYANAN RAPID TEST DIAGNOSIS COVID-19.....	19
2.1. Struktur Pasar	19
2.2. Pelaksanaan <i>Tying Agreement</i> untuk Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19	29
2.2.1. Konsep Perjanjian Tertutup	29
2.2.2. Konsep Perjanjian.....	29
2.2.3. Pelarangan <i>Tying Agreement</i> Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999	34
2.3. Dampak Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perjanjian Tertutup ..	50
2.3.1. Alasan Pelaku Usaha Membuat Perjanjian Tertutup.....	50
2.3.2. Aspek Negatif Pelaksanaan Perjanjian Tertutup	51
BAB III UPAYA KPPU BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA MENANGANI DUGAAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA YANG DILAKUKAN RUMAH SAKIT	57
3.1. Tugas dan Kewenangan KPPU.....	57
3.1.1. Tipe Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha	57
3.1.2. Tugas dan Wewenang KPPU.....	64
3.1.3. Sanksi pada UU No. 5 Tahun 1999	70
3.2. Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang Dilakukan oleh Rumah Sakit	74
BAB IV PENUTUP	83

4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran.....	84
DAFTAR BACAAN	85

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
7. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.